



KBPR. SENDANG HARTA SEJAHTERA

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Tahun 2022

🏠 Jl A Yani Pekukuhan Rt 05 Rw 03 Pekukuhan Mojosari,
Mojokerto

☎ 0321 591515

📠 0321 592621



OTORITAS
JASA
KEUANGAN





BAB I

PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, KBPR. Sendang Harta Sejahtera mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.62/POJK.03/2020 tanggal 16 Agustus 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BPR.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- l. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR
- n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR
- o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.
- p. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat



- q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
- r. Anggaran Dasar (AD) KBPR. Sendang Harta Sejahtera beserta perubahan-perubahannya.
- s. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Meningkatkan Kinerja dan efisiensi BPR, kepatuhan manajemen terhadap peraturan OJK, penerapan prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengelolaan BPR serta Melindungi BPR dari intervensi politik dan tuntutan hukum, kepentingan stakeholder untuk menarik minat dan kepercayaan.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA KBPR. SENDANG HARTA SEJAHTERA

1 Transparancy (Keterbukaan)

BPR mengungkapkan informasi pada visi, misi, strategi BPR, serta prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR sesuai peraturan yang berlaku Kebijakan tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut

2 Accountability

BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi, tugas tanggung jawab yang jelas selaras dengan visi, misi dan nilai-nilai Perusahaan
Kinerja yang konsisten dengan nilai perusahaan serta memiliki rewards & punishment system

3 Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan, menjadi bagian masyarakat peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar

4 Independency

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak, terbebas dari benturan kepentingan. Pengambilan keputusan obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun

5 Fairness

BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders dan memberikan kesempatan stakeholders memberi masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

BPR berkomitmen melakukan penyelarasan penerapan tata kelola dengan standar yang ditetapkan OJK sehingga dapat meningkatkan performa yang Baik dan daya saing tinggi



BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: PULIH WAHYU DIYONO, SE
	Jabatan	: 0100 - Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	<p>Tugas :</p> <p>Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan bank</p> <p>Mengkoordinir seluruh kegiatan operasional Bank dan melakukan hubungan kerjasama dengan pihak luar.</p> <p>Menjalankan semua kebijakan dan rencana tahunan yang telah ditetapkan serta mengkoordinir seluruh kegiatan dan melakukan pengawasan atas jalannya operasional Bank</p> <p>Bertindak atas nama bank baik keluar maupun ke dalam</p> <p>Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham dalam Rapat Anggota Tahunan</p> <p>Memastika terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai</p> <p>Tanggung jawab :</p> <p>Terciptanya kondisi bank yang sehat</p> <p>Terciptanya hubungan antar pegawai yang selaras dan serasi</p> <p>Terciptanya hubungan yang serasi dengan OJK dan pihak-pihak instansi terkait lainnya</p> <p>Terciptanya hubungan serasi BPR lainnya</p>
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: ATIK WIDYAWATI, SE
	Jabatan	: 0200 - Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab	<p>Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>Mengkoordinir seluruh pelaksanaan tugas intern operasional kantor Bank</p> <p>Mengkoordinir pelaksanaan tugas atas bagian yang dibawahanya dan mendorong kelancaran operasional kantor.</p> <p>Menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris dan OJK</p>



	<p>Memberikan rancangan-rancangan kerja kepada Direktur Utama dan ikut bertanggung jawab dalam pencapaian rencana kerja</p> <p>Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris</p>
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris	
	<p>Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional</p> <p>Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas</p> <p>Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat</p> <p>Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus-menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang</p> <p>Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat</p> <p>Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem</p> <p>Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi telah mendapat perhatian serius dari Direksi</p>

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris
1	<p>Nama : H. HERI SUSANTO,SP.MM</p> <p>Jabatan : Komisaris Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan</p> <p>Memberikan arahan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan operasional dan rencana kerja tahunan.</p> <p>Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Direksi dalam menjalankan kebijakan dan rencana kerja yang telah ditetapkan</p> <p>Memberikan teguran kepada Direksi jika adanya tindakan yang dilakukan oleh Direksi dipandang tidak sesuai dengan kebijakan atau ketentuan yang telah ditetapkan</p> <p>Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit



		<p>BPR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan <p>Memastikan Direksi menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan otoritas lainnya.</p>
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: RAHMAD MALIK JUNAIDY, AMD
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	<p>: Membantu Komisaris utama dalam memberikan arahan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan operasional dan rencana kerja tahunan.</p> <p>Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan</p> <p>Bersamaan dengan Komisaris Utama dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Direksi dalam menjalankan kebijakan dan rencana kerja yang telah ditetapkan</p> <p>Memeriksa dan mencocokkan uang kas serta dapat mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi</p>
Rekomendasi Kepada Direksi		
<p>Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional</p> <p>Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas</p> <p>Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi</p> <p>Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang</p> <p>Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem</p> <p>Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang</p>		

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
1	Komite Audit	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
2	Komite Pemantau Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	:



	-
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab : -

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	
-	-	-	-	-	-	-

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
2	Komite Pemantau Risiko
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	PULIH WAHYU DIYONO, SE	25.000.000	0,20%
2	ATIK WIDYAWATI, SE	-	-



2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	PULIH WAHYU DIYONO, SE	601696	PT BPR HARTA SWADIRI	-
2	PULIH WAHYU DIYONO, SE	600813	PT BPR DANAPUTRA SAKTI	-
3	ATIK WIDYAWATI, SE	601696	PT BPR HARTA SWADIRI	-
4	ATIK WIDYAWATI, SE	600813	PT BPR DANAPUTRA SAKTI	-

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	PULIH WAHYU DIYONO, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	ATIK WIDYAWATI, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	PULIH WAHYU DIYONO, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	ATIK WIDYAWATI, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	H. HERI SUSANTO, SP.MM	50.000.000	0,76%
2	RAHMAD MALIK JUNAIDY, AMD	-	-



2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	H. HERI SUSANTO,SP.MM	601696	PT BPR HARTA SWADIRI	-
2	H. HERI SUSANTO,SP.MM	600813	PT BPR DANAPUTRA SAKTI	-
3	RAHMAD MALIK JUNAIDY, AMD	601696	PT BPR HARTA SWADIRI	-
4	RAHMAD MALIK JUNAIDY, AMD	600813	PT BPR DANAPUTRA SAKTI	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	H. HERI SUSANTO,SP.MM	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	RAHMAD MALIK JUNAIDY, AMD	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	H. HERI SUSANTO,SP.MM	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	RAHMAD MALIK JUNAIDY, AMD	tidak ada	tidak ada	tidak ada

F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	336.000.000	2	156.000.000
2	Tunjangan	2	60.000.000	2	24.000.000
3	Tantiem	2	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
Total			396.000.000		180.000.000



2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	1 unit perumahan bagi Direksi yang beralamat dari luar kota Mojokerto	-
2	Transportasi	1 unit Mobil Xenia tahun 2017 dan 1 unit mobil Avanza tahun 2014	-
3	Asuransi Kesehatan	BPJS TK dan BPJS Kes	BPJS TK dan BPJS Kes
4	Fasilitas lainnya	Listrik, Telpon/pulsa	-

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan	
	(a/b)	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,61	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,36	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,14	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,38	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3,17	1

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2022-1-5	2	- Segera membuat pengajuan perubahan struktur untuk pemenuhan komisaris dan PSP. - Mengidentifikasi dalam pemberian kebijakan POJK No. 48/POJK.03/2020 tgl 3 Desember 2020 tentang stimulus bagi kredit yang terdampak. - Mensosialisasikan nama baru KBPR Sendang Harta Sejahtera kepada masyarakat terutama bagi nasabah kredit dan tabungan
2	2022-4-4	2	- Perlunya dilakukan persiapan likuiditas untuk antisipasi penarikan dana masyarakat berupa tabungan pasar dan sekolah sebagai persiapan hari Raya dan tahun ajaran baru. - Mempertimbangkan pemberian perpanjangan stimulus dan selektif dalam pemberian kredit
3	2022-7-7	2	- Perlu mewaspadai dan memitigasi potensi peningkatan kredit bermasalah - Dilakukannya Mapping penyebab kredit bermasalah untuk menentukan strategi penagihan yang efektif dan efisien .
4	2022-11-3	2	- Pengangkatan komisaris agar bisa membantu kinerja komisaris utama. - Pembuatan planning untuk penurunan kolektibilitas dalam capaian NPL sesuai rencana kerja - Perlu ditingkatkan penggalan dana masyarakat dalam bentuk tabungan umum sebagai sumber dana yang lebih efisien dalam pemenuhan likuiditas dan penurunan LDR



2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Peserta		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	H. HERI SUSANTO,SP.MM	4	0	100,00%
2	RAHMAD MALIK JUNAIDY, AMD	1	0	25,00%

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Penerima Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
-	-	-	-	-	-	-	-

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	2022-03-21	Sosial	Sebagai bentuk sosialisasi untuk kebersihan dan adat	Desa Pekukuhan	500.000
2	2022-07-22	Sosial	untuk menunjang pendidikan keagamaan	Tempat Pendidikan AL qur'an	500.000
3	2022-08-06	Sosial	lomba dan hiburan	Kelurahan Pekukuhan	1.000.000



M. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola KOP. BPR Sendang Harta Sejahtera ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di KOP. BPR Sendang Harta Sejahtera. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola KOP. BPR Sendang Harta Sejahtera ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di KOP. BPR Sendang Harta Sejahtera, Terima Kasih.

Mojokerto, 27 Januari 2023

Persetujuan Pengurus KBPR. Sendang Harta Sejahtera



H. HERI SUSANTO, SP.MM
Komisaris Utama



PULIH WAHYU DIYONO, SE
Direktur Utama